

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
(SPAK) ZI DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA  
PERIODE III JULI - SEPTEMBER 2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Negeri Gresik terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public. Mengacu pada surat edaraan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023; Dan wujud komitmennya disusun Survey Persepsi anti korupsi, dengan adanya survey ini dapat dijadikan parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas **153** responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana, pasca sarjana **71,90%** dan **28,10%** lainnya berlatar pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan untuk jenis pekerjaan responden sebagai kategori lainnya sebesar **70,75%** termasuk diantaranya mahasiswa, Advokat dan mayoritas pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun berada pada persentase **30,07%** yang mendominasi dari beberapa usia lainnya;

**BAB II**

**TUJUAN**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaikan terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

**BAB III**

**DASAR HUKUM**

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

- 3. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- 4. UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- 5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menti Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
- 6. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
- 7. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019;
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evalusai Zona integritas 2023.

**BAB V**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III pada Periode Juli 2025 sampai dengan September 2025 berada pada **3,5324 - 4,00**, rerata **3,94** atau dengan skala 100 adalah sebesar **98,53%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 - 100,00**;

Adapun capaian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II pada Periode April 2025 sampai dengan Juni 2025 berada pada **3,5324 - 4,00**, rerata **4,00** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,97%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 - 100,00**;

Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan 0,06 dalam skala 100 dan 1,44% dalam skala presentase. Namun nilai tersebut masih dalam kategori sangat baik berdasarkan satuan nilai standart minimum yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik, yang artinya Pengadilan Negeri Gresik tetap menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi, sehingga indeks tersebut berada pada kategori **SANGAT BAIK** sesuai dengan rencana sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA;

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

| No | Monitoring | Evaluasi |
|----|------------|----------|
|----|------------|----------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Dari 5 ruang lingkup survey indeks persepsi anti korupsi menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks <b>3,94</b> atau <b>98,53%</b> masuk dalam kategori persepsi Kinerja unit pelayanan <b>BERSIH DARI KORUPSI</b> dimana nilai interval korupsi berada pada angka 88,31 - 100,00</p>                                                          | <p>Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <p>Bahwa dari 5 ruang lingkup survei tersebut didapatkan 3 nilai Score tertinggi yaitu ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada penerimaan imbalan dengan nilai score <b>3,94</b>;</li> <li>• tidak ada pungutan liar dengan nilai score <b>3,94</b>;</li> <li>• tidak ada praktek percaloan dengan nilai score <b>3,94</b>;</li> </ul>                                                                          | <p>Untuk 5 ruang lingkup survey didapatkan nilai Score <b>3,94</b> hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Gresik menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi;</p>                                                                                                  |
| 3 | <p>Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan dengan nilai score <b>3,92</b>;</li> <li>• tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan pada pelayanan dengan nilai score <b>3,93</b>;</li> <li>• tidak ada penerimaan imbalan dengan nilai score <b>3,94</b>;</li> </ul> | <p>Perlu dicermati dasar-dasar mengapa tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan, tidak ada diskriminasi pada pelayanan, tidak ada penerimaan imbalan pada unit pelayanan sehingga harus dilakukan perbaikan - perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah.</p> |

## BAB VI KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 5 ruang lingkup survey didapatkan dengan nilai Score **3,94** pada 3 ruang lingkup tidak ada penerimaan imbalan, tidak ada pungutan liar, tidak ada praktek percaloan. Hal ini membuktikan bahwa

Pengadilan negeri Gresik mampu menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi dan pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK** untuk semua ruang lingkup tersebut dan membuktikan Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan, tidak ada Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas, Tidak ada pungutan Liar dan tidak ada Pencaloan/Perantara sudah sangat baik, terlihat dari score terhadap unsur tersebut nilai rata-rata **3,94**. 3 unsur terendah terdapat pada tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan dengan Score **3,92**, tidak ada diskriminasi pada pelayanan dengan score dengan score **3,93**, tidak ada penerimaan imbalan dengan Score **3,94**, ketiga nilai tersebut pada dasarnya tidak terlalu jauh dengan nilai tertinggi namun demikian nilai terendah tersebut masuk dalam interval **3,5324 - 4,00** yang artinya walaupun dikategorikan 3 nilai terendah namun nilai tersebut tergolong sangat tinggi yang mengindikasikan persepsi Pengadilan Negeri Gresik "**BERSIH DARI KORUPSI**";

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung;
- Agar pengguna layanan selalu ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan/petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri/hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai/petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;
- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan;
- Petugas PTSP tidak pernah melakukan diskriminasi kepada pengguna layanan dan melayani sesuai nomor urut antrian yang telah disediakan oleh para petugas;

- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Pengadilan Negeri Gresik berupaya melakukan kegiatan rutin pengajian setiap hari kamis yang dilakukan di mushola untuk menguatkan pentingnya akan hal tidak menerima suap dan bekerja sesuai standart yang telah di tentukan oleh Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri.

**Penanggungjawab**

  
**MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.**

**Gresik, 01 Oktober 2025**

**Koordinator Tim Survey**

  
**ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.**

**TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE II APRIL – JUNI 2025**

**PENDAHULUAN**

Sejalan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani Pengadilan Negeri Gresik berkomitmen untuk terus memberikan Pelayanan publik yang berkualitas dalam usaha mencegah dan pemberantasan korupsi;

Pengadilan Negeri Gresik terus memantau semua potensi adanya pelayanan yang mengarah pada adanya korupsi dengan melakukan berbagai pencegahan, mulai dari gedung yang dirancang membatasi pertemuan dengan pihak sampai sarana prasarana Pengadilan yang dibuat sedemikian rupa untuk pencegahan adanya korupsi guna melaksanakan peran penyelenggaraan fungsi pelayanan yang strategis agar terhindar dari korupsi;

**TUJUAN**

Agar semua hasil survey dapat diketahui dan ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan pelayanan yang bebas korupsi;

**REKOMENDASI TIM SURVEY**

- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung;
- Agar pengguna layanan selalu ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan/petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri/hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai/petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;

- Agar supaya diingatkan kepada para petugas pelayanan juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan;
- Agar dilakukan pembinaan secara berkala kepada Petugas PTSP supaya tidak pernah melakukan diskriminasi kepada pengguna layanan dan melayani sesuai nomor urut antrian yang telah disediakan oleh para petugas;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Agar selalu dilaksanakan kegiatan rutin pengajian setiap hari kamis yang dilakukan di mushola untuk menguatkan pentingnya akan hal tidak menerima suap dan bekerja sesuai standart yang telah di tentukan oleh Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri.

### **HASIL TINDAK LANJUT**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya;

#### **1. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan**

- Pengadilan Negeri Gresik memberikan pelayanan kepada pengguna layanan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP karena semua layanan terkoneksi secara Administrasi pada semua layanan, baik itu bagian Umum, Pidana, Perdata, Hukum, PHI sehingga semua data pengguna layanan tercatat sehingga tidak memungkinkan adanya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan;
- Setiap kegiatan petugas PTSP selalu dipantau langsung dengan CCTV, untuk meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas;
- Para petugas setiap hari telah di Briefing baik pada awal melaksanakan tugas PTSP dipagi hari maupun akhir tugas disore hari dengan mengedepankan profesionalisme dalam melaksakana tugas sesuai SOP;
- Bagi petugas yang melakukan layanan diluar Prosedur tentu akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran oleh penanggungjawab PTSP sampai dengan peringatan tertulis.

#### **2. Diskriminasi pada pelayanan**

- Pengadilan Negeri Gresik tidak pernah membenarkan adanya diskriminasi layanan terhadap semua pengguna layanan;

- Pengadilan negeri Gresik telah menyiapkan semua fasilitas untuk seluruh pengguna layanan termasuk kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
- Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan tidak memandang jabatan dan sebagainya, kepada siapa yang pertama datang dia yang diberikan prioritas dalam bentuk antrian sehingga tidak merugikan pengguna layanan lainnya yang telah datang terlebih dahulu;
- Pengadilan Negeri melakukan pelayanan secara seimbang dan tidak tebang pilih sehingga perlakuan yang diberikan kepada pengguna layanan sama semua pengguna layanan diharuskan melalui prosedur sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan;
- Bagi pengguna layanan yang merasa di perlakukan diskriminasi dapat melaporkan apa yang dirasakannya melalui layanan pengaduan baik secara langsung melalui PTSP, website siwas, nomor pengaduan yang disediakan atau bersurat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan atas layanan yang diberikan oleh petugas.

### **3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ jasa**

- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan, termasuk melengkapi semua tempat-tempat strategis dengan CCTV, dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Gresik bagi para petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yaitu petugas PTSP dan juga petugas Di anjungan Mandiri untuk tidak menerima imbalan uang/ barang/ jasa dari pengguna layanan;
- Semua tindakan para petugas dapat dipantau langsung melalui CCTV yang terkoneksi di ruang Ketua Pengadilan dan juga ruang Wakil ketua Pengadilan sehingga apabila ada aktivitas mencurigakan dari petugas dapat terdeteksi dengan jelas, dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan petugas PTSP atau petugas Anjungan mandiri menerima imbalan uang/barang/jasa dari Pengguna layanan dan apabila terjadi maka pimpinan akan bersikap tegas;
- Pengguna layanan diminta untuk tidak memberikan imbalan uang/barang/jasa kepada para petugas dengan setiap 2 jam sekali diputar rekaman suara yang berisikan pengunjung/pengguna layanan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada warga pengadilan;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;
- Di semua ruangan dan juga di PTSP serta anjungan mandiri sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna

layanan menemukan praktek petugas yang mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.

- Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

**Penanggungjawab**

  
**MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.**

**Gresik, 01 Oktober 2025**

**Koordinator Tim Survey**

  
**ZULVIKAR NUR BARLIAN, SH.**

**Mengetahui**

**Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial kelas IA Gresik**

  
**ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.**  
**196807071996031002**

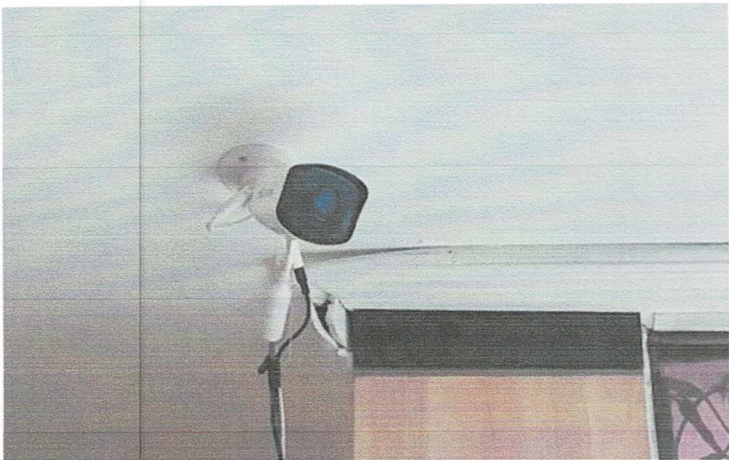
**EVIDEN TINDAK LANJUT**



**Foto Briefing Petugas Layanan**



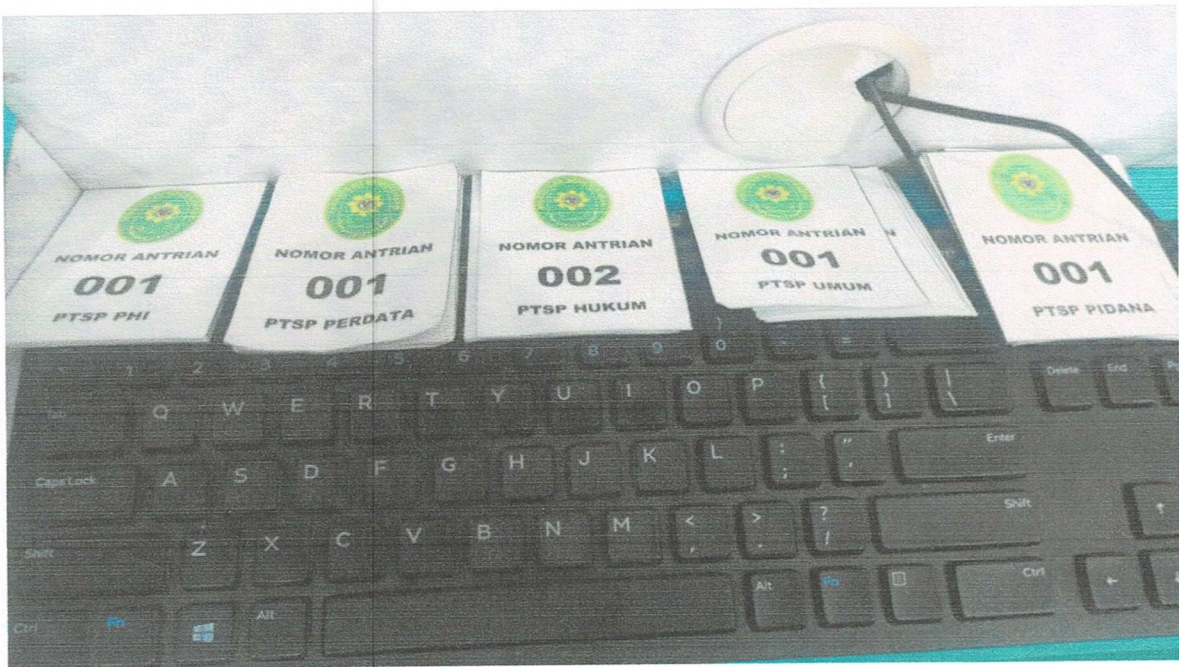
**Foto Pemutaran Speaker Pemutaran Suara Tidak Menerima Gratifikasi Setiap 2 Jam**



**Foto pemantauan CCTV**



**Pelatihan petugas bagi penyandang disabilitas**



**Foto nomor antrian**